



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB. ROTE
NDAO



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

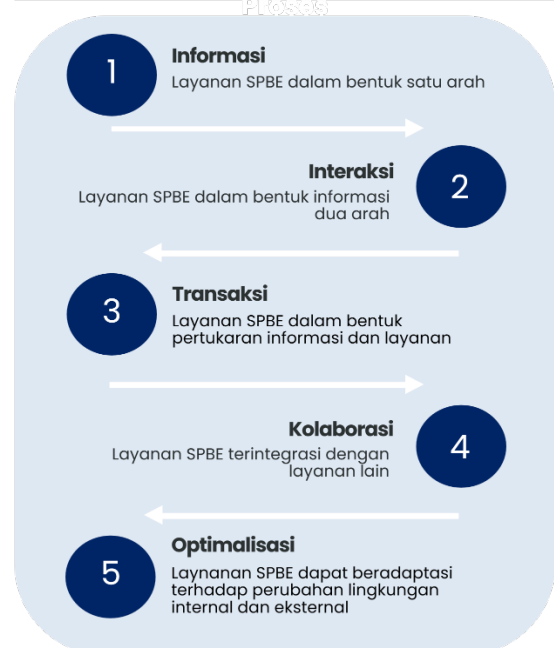
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



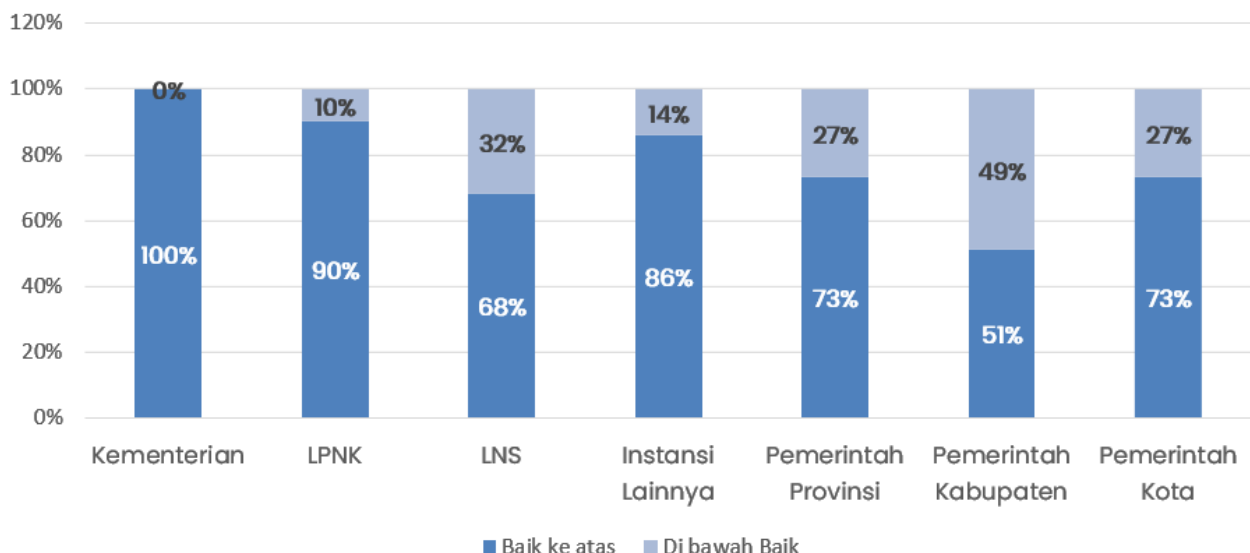
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6		Cukup																	
5	< 1,8		Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

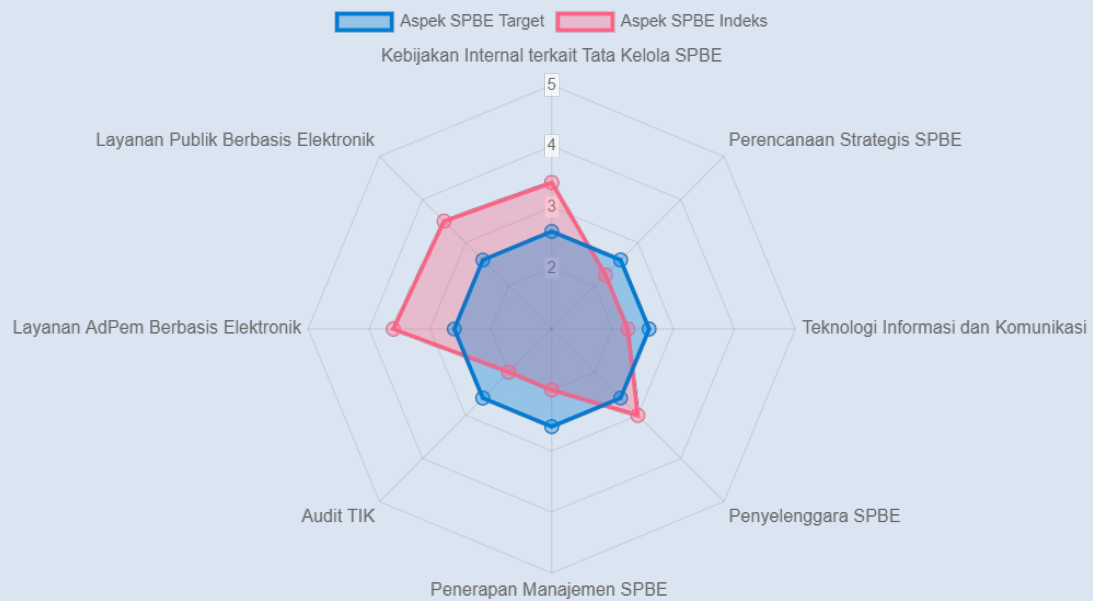
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,99
Domain Kebijakan SPBE	3,40
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,40
Domain Tata Kelola SPBE	2,40
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,00
<i>Audit TIK</i>	2,00
Domain Layanan SPBE	3,56
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,50

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi seluruhnya oleh Kabupaten Rote Ndao, yaitu dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal untuk seluruh indikator (indikator 1-10) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Rote Ndao. Kebijakan Internal Tata Kelola dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 18/KEP/HK/TAHUN 2022 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan serta norma arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit TIK, serta tim koordinasi SPBE di lingkup pemerintahan Kabupaten Rote Ndao. Peraturan Bupati tersebut telah mencakup seluruh ruang lingkup sesuai dengan referensi penyelenggaraan SPBE.

- Kelemahan

-

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Rote Ndao adalah dengan adanya Perencanaan Strategis Arsitektur SPBE, Perencanaan Strategis Peta Rencana SPBE, Perencanaan Strategis Rencana dan Anggaran SPBE, dan Perencanaan Strategis Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis ini dapat terlihat adanya Perencanaan Strategis Rencana dan Anggaran SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Rote Ndao. Perencanaan Strategis Rencana dan Anggaran SPBE dibuktikan dengan adanya dokumentasi penyelenggaraan dan evaluasi proses perencanaan dan penganggaran, termasuk di dalamnya yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta notulensi lain terkait proses konsultasi dan review.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Kabupaten Rote Ndao masih belum melaksanakan Perencanaan Strategis Arsitektur SPBE, Perencanaan Strategis Peta Rencana SPBE, dan Perencanaan Strategis Proses Bisnis SPBE secara lengkap sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Baik Perencanaan Strategis Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, maupun Proses Bisnis SPBE telah mulai dilakukan namun pelaksanaannya belum mencakup seluruh muatan yang ditentukan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Rote Ndao adalah dengan adanya Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kematangan Layanan Pusat Data, Kematangan Layanan Jaringan Intra, dan Kematangan Sistem Hubung Layanan.

- Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE (indikator 15) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Rote Ndao. Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen SOP Pengembangan Aplikasi yang mengatur tahapan pengembangan aplikasi di seluruh perangkat daerah. Bukti tersebut didukung oleh sejumlah dokumentasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan aplikasi.

- Kelemahan

Namun di sisi lain, Kabupaten Rote Ndao masih belum memiliki Kematangan Layanan Pusat Data (indikator 16), Kematangan Layanan Jaringan Intra (indikator 17), dan Kematangan Sistem Hubung Layanan (indikator 18) secara lengkap sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Baik layanan pusat data, jaringan intra, dan sistem hubung layanan telah mulai dilakukan namun pelaksanaannya belum mencakup seluruh muatan yang ditentukan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Rote Ndao adalah dengan adanya Kematangan Tim Koordinasi SPBE dan Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya Kematangan Tim Koordinasi SPBE (indikator 19) dan Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE (indikator 20) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Rote Ndao. Tata Kelola Tim Koordinasi dan Kolaborasi Penerapan SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen Keputusan Bupati Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, pelaksanaan kolaborasi juga diperlihatkan dalam dokumen Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE serta dokumentasi pelaksanaan rencana kerja tersebut.
- Kelemahan
-

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Rote Ndao adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi SDM, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, serta Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
-
- Kelemahan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat bahwa Kabupaten Rote Ndao masih belum melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko SPBE (indikator 21), Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (indikator 22), Penerapan Manajemen Data (indikator 23), Penerapan Manajemen Aset TIK (indikator 24), Penerapan Kompetensi SDM (indikator 25), Penerapan Manajemen Pengetahuan (indikator 26), Penerapan Manajemen Perubahan (indikator 27), serta Penerapan Manajemen Layanan SPBE (indikator 28) secara lengkap sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Kabupaten Rote Ndao telah memiliki dokumen Rencana Induk SPBE Tahun 2020 yang digunakan sebagai acuan penerapan manajemen SPBE, namun penerapannya tersebut belum mengikuti pedoman yang ditentukan.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Rote Ndao adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

- Kekuatan
-
- Kelemahan
Pada Aspek Audit TIK ini dapat terlihat bahwa Kabupaten Rote Ndao masih belum melakukan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (indikator 29), Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (indikator 30), dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (indikator 31) secara lengkap sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan proses audit sesuai Rencana Induk SPBE Tahun 2020, namun penerapannya belum mengikuti pedoman yang ditentukan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Rote Ndao adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan (indikator 32), Layanan Penganggaran (indikator 33), Layanan Keuangan (indikator 34), Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (indikator 35), Layanan Kepegawaian (indikator 36), Layanan Kearsipan Dinamis (indikator 37), dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (indikator 38) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Rote Ndao. Untuk layanan perencanaan, penganggaran, dan keuangan, Kabupaten Rote Ndao telah menggunakan aplikasi SIPD. Untuk layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Rote Ndao menggunakan LPSE dengan indeks e-catalog local

telah mencapai di atas 80%. Untuk layanan kepegawaian, Kabupaten Rote Ndao menggunakan SIASN. Untuk layanan kearsipan dinamis, Kabupaten Rote Ndao menggunakan Srikandi. Adapun untuk layanan pengelolaan barang milik daerah, Kabupaten Rote Ndao menggunakan aplikasi SIMD.

- Kelemahan

-

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Rote Ndao adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Publik Sektor 1 (indikator 45), Layanan Publik Sektor 2 (indikator 46), dan Layanan Publik Sektor 3 (indikator 47) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Rote Ndao. Layanan Publik Sektor yang digunakan oleh Kabupaten Rote Ndao antara lain aplikasi OSS untuk mendukung perizinan sekaligus mendukung RB Tematik Peningkatan Investasi, aplikasi V-TAX yang mendukung pemrosesan data PBB masyarakat secara online, dan aplikasi Mamaboi untuk mendukung pengelolaan data ibu hamil dan bayi yang sekaligus mendukung RB Tematik Prioritas Presiden yaitu pencegahan stunting.

- Kelemahan

-

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE, akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Kabupaten Rote Ndao. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Rote Ndao, yaitu dengan nilai indeks 3.6025, sudah dapat menggambarkan predikat Sangat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Rote Ndao adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari adanya Peraturan Bupati Nomor 18/KEP/HK/TAHUN 2022 sebagai dasar hukum penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Rote Ndao. Kebijakan tersebut telah mencakup muatan-muatan sesuai pedoman penyelenggaraan SPBE secara lengkap. Lebih jauh lagi, Kabupaten Rote Ndao juga telah membangun tim koordinasi dan kolaborasi SPBE yang juga telah memiliki rencana kerja. Rencana kerja tersebut menjadi pedoman pelaksanaan penerapan dan evaluasi SPBE di Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, tim koordinasi dan kolaborasi SPBE juga menggambarkan arah koordinasi secara menyeluruh antar perangkat daerah. Pada aspek layanan, baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik, Kabupaten Rote Ndao telah memanfaatkan berbagai aplikasi umum maupun aplikasi berbagi pakai, antara lain SIPD, SIMD, LPSE, dan Srikandi. Kabupaten Rote Ndao juga memanfaatkan aplikasi OSS dan Mamaboi yang mendukung penerapan RB Tematik. Seluruh kebijakan dan pemanfaatan layanan tersebut memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten Rote Ndao yang terorganisir dan menyeluruh dalam lingkup perangkat daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah menjadi optimal.

Namun di sisi lain, Kabupaten Rote Ndao masih menunjukkan beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, dan Aspek Audit TIK. Dari segi perencanaan strategis, Kabupaten Rote Ndao sudah memiliki peta rencana yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan SPBE, namun peta rencana tersebut belum mencakup seluruh muatan sesuai dengan referensi penyelenggaraan SPBE. Pada aspek penerapan manajemen SPBE, termasuk di dalamnya audit TIK, Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan sejumlah penerapan manajemen sesuai mandat peta rencana, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman standar yang ditentukan. Oleh karena itu, hasil pelaksanaan manajemen SPBE tersebut belum dapat dikatakan memenuhi standar yang berlaku, yang membuat pelaksanaan SPBE menjadi kurang optimal.

Kabupaten Rote Ndao telah berhasil memperoleh predikat Sangat Baik untuk penerapan SPBE di lingkup daerahnya, dan itu patut diapresiasi. Pencapaian tersebut tentunya diperoleh melalui kolaborasi dan kerja sama semua pihak. Terhadap semua aspek yang dapat dikatakan unggul, seperti Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Kabupaten Rote Ndao hendaknya terus berusaha untuk menjaga keberlangsungan pencapaian aspek-aspek tersebut, sehingga optimalitas pelaksanaan SPBE tetap terjaga, serta di evaluasi berikutnya, nilainya bisa meningkat atau paling tidak tetap terjaga baik. Adapun untuk aspek-aspek yang masih dianggap lemah, Kabupaten Rote Ndao hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan indikator dan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan target. Secara spesifik, pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, hal yang kiranya dapat dilakukan adalah melengkapi dokumentasi arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sesuai dengan cakupan dan muatan yang diatur dalam referensi penyelenggaraan SPBE. Selain itu, Kabupaten Rote Ndao juga dapat menyempurnakan dokumentasi proses bisnis sehingga dapat memperlihatkan inovasi yang membuat proses bisnis menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK, Kabupaten Rote Ndao hendaknya dapat merujuk kepada pedoman yang ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Rote Ndao memenuhi standar yang berlaku, sehingga dapat mendukung optimalitas penyelenggaraan SPBE nasional.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3